

TESIS

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada
Pascasarjana Universitas Andalas



Pembimbing I : Prof. Dr. ISMANSYAH, SH.MH

Pembimbing II : Dr. SISKALVANDARI, SH. MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

ABSTRAK

Nama : **PANGERAN ARISTOFANES MUSTHAFA, S.H.**
NIM : 1121211005
Judul Tesis : **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
POLDA SUMATERA BARAT**
Dosen Pembimbing : 1. **Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H.**
2. **Dr. SISKI ELVANDARI, S.H., M.H.**
Jumlah Halaman : 108 Halaman

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika, yang kedua untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, ini berarti bahwa di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari proses penyidikan tindak pidana narkotika. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan untuk menangkap tersangka selama 3X24 jam, menimbulkan kekhawatiran akan lepasnya tersangka dari jerat hukum jika tidak cukup bukti. Penyidik memiliki wewenang dalam menentukan arah kasus hukum tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan narkotika, terutama sanksi hukumnya. Adapun langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika meliputi *observation* (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan). Hambatan yang ditemui para penyidik adalah penegakan hukum secara sistematis, kurangnya anggaran untuk mengungkap kasus narkotika, dan pengkualifikasian antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar narkotika. Usaha yang perlu dilakukan adalah upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Kata kunci : proses penyidikan, tindak pidana, narkotika.

ABSTRACT

Name : PANGERAN ARISTOFANES MUSTHAFA, S.H.
NIM : 1121211005
Title Thesis : PROCESS OF CRIMINAL INCIDENT INSTITUTION IN
THE DIRECTORATE OF RESERSE DRUGS POLDA
SUMATERA BARAT
Supervisor : 1. Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H.
2. Dr. SISKALVANDARI, S.H., M.H.
Number of Pages : 108 Pages

This study aims to, firstly to find out how the process of investigation of narcotics criminal act, the second to knowing barriers that occur in the process of investigation of narcotics crime. The research was conducted at the Directorate of Drug Investigation of West Sumatra Police. The method of approach used in this study is the sociological juridical method, this means that in addition to judicial from the view of legislation and legal provisions which is the basic idea of the process of investigation of narcotics crime. While the specification in this research is descriptive analytical, that is research which describe in detail social phenomenon which become principal perblems. The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the literature study. The results showed that the process of investigation of narcotic crime in the Directorate of Narcotics Investigation of West Sumatra Police in conducting an investigation to arrest the suspect for 3X24 hours, raises concerns about the release of the suspect from the law if there is not enough evidence. Investigators have authority in determining the direction of narcotic drug crime cases in accordance with Law no. 35 of 2009 on Narcotics governing all matters relating to narcotics, especially legal sanctions. The investigator steps in uncovering the problem of someone who commits a narcotic crime include observation, surveillance, undercover agent, undercover buy, controlled planning, and raid planning execution. Obstacles encountered by investigators are systematic law enforcement, lack of budget to uncover narcotics cases, and qualifying between addicts, abusers, and narcotics dealers. Efforts that need to be done are preemptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts from law enforcement, government, and society.

Keywords: investigation process, crime, narcotics.